



Analisis Persepsi Mahasiswa PPKn UNIMED Tentang Asas Kemaslahatan Pada Program Makan Bergizi Gratis Dalam Tinjauan Hukum Islam

Agnes E Manalu^{1*}, Angela Eva Nia², Ayu Tri Chahyani³, Hanaya Manuela Ambarita⁴, Nabila Devia Hummaira⁵, Pawer Erwin Pakpahan⁶, Rima Volyna Munthe⁷, Silvia Mahrani⁸, Solavide Ginting⁹, Tebi Tafianta Banjarnahor¹⁰, Ulan Dari¹¹, Yulia Fanissah Sihotang¹², M. Iqbal¹³

Universitas Negeri Medan, Indonesia

Email Korespondensi: agnesmanalu137@gmail.com, angelonia02@gmail.com, ayutrachahyani809@gmail.com, hanayamanuelaambarita@gmail.com, nabiladeviahummaira@gmail.com, pakpahanpawer@gmail.com, rimamunthe23@gmail.com, hanayamanuelaambarita@gmail.com, solavideginting76@gmail.com, tebibanjarnahor@gmail.com, ulandaridarii707@gmail.com, yuliafanissahsihotang@gmail.com, m.iqbal@unimed.ac.id

Article received: 15 September 2025, Review process: 25 September 2025

Article Accepted: 10 Oktober 2025, Article published: 08 November 2025

ABSTRACT

This study examines the Free Nutritious Meal Program (MBG) as a public policy initiative by the Indonesian government from the perspective of Islamic law. The main focus of the research is to assess the extent to which the program fulfills the principle of public benefit (*al-mashlahah*), which lies at the core of *maqāṣid al-syarī'ah*: the preservation of religion (*ḥifẓ al-dīn*), life (*ḥifẓ al-nafs*), intellect (*ḥifẓ al-'aql*), lineage (*ḥifẓ al-nasl*), and property (*ḥifẓ al-māl*). A qualitative approach was employed through literature analysis and interviews with PPKn students at UNIMED. The findings indicate that MBG provides significant benefits, including improved nutrition for schoolchildren, prevention of stunting, and enhanced learning concentration, aligning with *maqāṣid al-syarī'ah*, particularly in the aspects of *ḥifẓ al-nafs* and *ḥifẓ al-'aql*. However, challenges such as budget transparency, the quality of halal-thayyib meals, and equitable distribution are critical factors that may diminish the program's overall benefit. Students perceive that despite potential technical obstacles, the program's substance remains highly beneficial. The study recommends strict oversight, open audits, and the involvement of nutrition experts and halal certification bodies to ensure the program's sustainability and alignment with Islamic principles of public benefit.

Keywords: Free nutritious meal program, principle of public benefit, university students

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai kebijakan publik pemerintah Indonesia dalam perspektif hukum Islam. Fokus utama penelitian adalah menilai sejauh mana program ini memenuhi prinsip kemaslahatan (*al-mashlahah*) yang menjadi inti *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Pendekatan kualitatif digunakan dengan analisis literatur dan wawancara terhadap mahasiswa PPKn UNIMED. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MBG memberikan manfaat signifikan berupa pemenuhan gizi anak sekolah, pencegahan stunting, dan peningkatan konsentrasi belajar, sehingga selaras dengan *maqāṣid al-syarī'ah* terutama dalam aspek *ḥifẓ al-nafs* dan *ḥifẓ al-'aql*. Namun, tantangan seperti transparansi anggaran, kualitas makanan yang halal-thayyib, dan pemerataan distribusi menjadi faktor kritis yang dapat menurunkan

nilai kemaslahatan. Mahasiswa menilai bahwa meskipun terdapat potensi kendala teknis, substansi program tetap membawa kemanfaatan besar. Penelitian ini merekomendasikan pengawasan ketat, audit terbuka, serta keterlibatan ahli gizi dan lembaga sertifikasi halal untuk memastikan keberlanjutan dan kesesuaian program dengan prinsip kemaslahatan Islam.

Kata Kunci: Asas Kemaslahatan, Mahasiswa, Makan Bergizi Gratis

PENDAHULUAN

Program makan bergizi gratis atau kerap disebut MBG adalah salah satu kebijakan pemerintah dalam meningkatkan sumber daya manusia, serta diharapkan dapat mengurangi persoalan gizi yang masih menjadi tantangan di Indonesia, terutama kasus stunting, rendahnya kualitas kesehatan, dan kurangnya daya saing generasi muda di masa depan. Dalam kebijakan publik, program ini menggambarkan fungsi negara dalam memberikan pelayanan dasar kepada warga negara. Menurut Easton (1965) dalam buku yang berjudul “politik dan kebijakan publik” oleh (Fidhia Aruni et al., n.d.), mengatakan bahwa kebijakan publik adalah alokasi nilai secara otoritatif yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan bersama. Dalam UUD 1945 Pasal 28H ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, termasuk memperoleh layanan kesehatan. Dalam pasal 34 ayat (1) menegaskan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Kedua pasal ini menjadi landasan pelaksanaan program makan bergizi gratis yang dapat dipahami sebagai kewajiban negara dalam memenuhi hak warga negara, khususnya hak atas gizi dan kesehatan.

Dalam tinjauan hukum Islam, kebijakan publik seharusnya berorientasi pada prinsip kemaslahatan. Al-Ghazali mendefinisikan kemaslahatan (*al-mashlahah*) sebagai segala hal yang mendatangkan manfaat dan mencegah mudarat, yang diarahkan untuk menjaga lima kebutuhan pokok kehidupan manusia (*al-dharuriyyat al-khamsah*), yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Sutikno et al., 2023). Al-Syatibi menegaskan tujuan utama syariat (*maqāṣid al-sharī'ah*) adalah menghadirkan kemaslahatan dan menolak kerusakan dalam kehidupan manusia (Toriquddin, 2014). Menurut Wahbah al-Zuhaili (Hasibuan A, 2024) menekankan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab moral dan syar'i untuk merumuskan kebijakan yang benar-benar bermanfaat bagi rakyat. Dengan demikian, MBG dapat dipandang sebagai wujud nyata prinsip *hifz al-nafs* (menjaga jiwa) dan *hifz al-aql* (menjaga akal), karena gizi yang memadai berperan penting dalam kesehatan tubuh sekaligus perkembangan intelektual generasi muda.

Namun demikian, penerapan suatu kebijakan sering kali menghadapi kesenjangan dengan tujuan ideal yang dirumuskan, baik terkait efektivitas distribusi, kualitas pelaksanaan, maupun penerimaan masyarakat. Seperti yang dikemukakan oleh Dunn (2018), kebijakan publik sering kali menghadapi *implementation gap*, yakni kesenjangan antara apa yang direncanakan dengan apa yang diwujudkan (Herawan, 2025). Kesenjangan inilah yang membuat kebijakan yang secara konsep ideal tidak jarang menghadirkan problem baru dalam

penerapan kebijakan. Dalam konteks program MBG, kesenjangan tersebut bisa muncul dalam bentuk distribusi yang tidak merata antarwilayah, standar kualitas gizi yang belum seragam, atau minimnya pengawasan terhadap pelaksanaan di lapangan. Lebih jauh, persoalan politik anggaran juga menjadi perdebatan. Dengan alokasi dana yang begitu besar, muncul pertanyaan mengenai keberlanjutan program, efektivitas penggunaannya, dan apakah kebijakan ini benar-benar berorientasi pada kepentingan rakyat atau sekadar menjadi instrumen populisme politik. Menurut Dye (2013) dalam (Sutmasa, 2021), kebijakan publik tidak pernah steril dari kepentingan politik karena ia adalah produk dari interaksi antara nilai, kekuasaan, dan sumber daya. Artinya, meskipun program MBG tampak pro-rakyat, ia tetap harus dikritisi dari aspek akuntabilitas fiskal dan komitmen jangka panjang pemerintah.

Dalam hal ini, mahasiswa memiliki posisi strategis karena mereka tidak hanya berperan sebagai penerima manfaat langsung dari kebijakan pendidikan dan gizi, tetapi juga sebagai kelompok intelektual yang terbiasa berpikir kritis. Mahasiswa sebagai kelompok intelektual dan *agent of change* memiliki peran penting dalam menilai dan mengkritisi kebijakan publik. Oleh karena itu, persepsi mahasiswa mengenai asas kemaslahatan dalam program MBG tidak hanya menggambarkan respons atas suatu kebijakan, tetapi juga menjadi tolok ukur sejauh mana nilai-nilai kemaslahatan Islam terimplementasi dalam kebijakan publik. Apabila mahasiswa memandang program tersebut selaras dengan prinsip kemaslahatan, maka dapat dikatakan bahwa MBG memperoleh legitimasi moral yang signifikan. Sebaliknya, apabila muncul kritik yang substansial, hal itu dapat diposisikan sebagai masukan konstruktif bagi pemerintah untuk memperbaiki desain maupun implementasi program, sehingga lebih sesuai dengan tujuan syariat dan kebutuhan masyarakat. Dengan cara demikian, kebijakan MBG dapat terhindar dari kecenderungan populisme jangka pendek dan bertransformasi menjadi kebijakan yang berkelanjutan, berkeadilan, serta memiliki landasan normatif yang kuat dalam perspektif hukum Islam.

METODE

Metode penelitian kualitatif merupakan pendekatan ilmiah yang digunakan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam dan holistik. Menurut Sugiyono dalam buku *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, metode ini digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti berperan sebagai instrumen kunci, pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi. Sementara itu, Lexy J. Moleong menjelaskan bahwa penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami dunia subjektif individu melalui data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Kedua ahli ini menekankan pentingnya konteks, makna, dan pengalaman subjektif dalam proses penelitian. Dalam metode kualitatif, pendekatan yang digunakan dapat beragam, namun pendekatan fenomenologis sangat relevan untuk menggali persepsi individu terhadap suatu fenomena sosial. Pendekatan ini

berfokus pada pemahaman pengalaman hidup dan cara individu memaknai realitas yang mereka hadapi (Sugiyono, 2022).

Dalam konteks penelitian berjudul “Analisis Persepsi Mahasiswa PPKn UNIMED tentang Asas Kemaslahatan pada Program Makan Bergizi Gratis dalam Tinjauan Hukum Islam”, pendekatan fenomenologis memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi secara mendalam bagaimana mahasiswa memaknai asas kemaslahatan yang terkandung dalam program tersebut. Program makan bergizi gratis, sebagai kebijakan publik yang menyentuh aspek kesejahteraan dan keadilan sosial, dapat ditinjau dari perspektif hukum Islam yang menekankan prinsip maslahah (kemaslahatan) sebagai landasan normatif. Melalui metode kualitatif, peneliti dapat menggali persepsi mahasiswa mengenai apakah program tersebut dianggap membawa manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam konteks pendidikan dan kesehatan, serta bagaimana mereka menilai kesesuaiannya dengan nilai-nilai keislaman. Dengan wawancara mendalam dan observasi, peneliti dapat menangkap nuansa pemikiran mahasiswa yang tidak dapat diungkap melalui pendekatan kuantitatif. Oleh karena itu, metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologis menjadi pilihan yang tepat untuk memahami persepsi mahasiswa secara komprehensif dan bermakna terhadap kebijakan publik yang dikaji.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemahaman Mahasiswa mengenai Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Berdasarkan hasil wawancara, pemahaman mahasiswa mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG) relatif seragam. Secara umum, mereka menilai bahwa MBG bukan hanya sekadar program sosial, melainkan bagian dari kebijakan strategis pemerintah untuk memenuhi hak dasar anak-anak sekolah berupa asupan gizi yang sehat dan layak. Program ini dipandang hadir sebagai bentuk perhatian negara dalam menjamin kualitas hidup generasi penerus, sekaligus sebagai langkah preventif terhadap masalah gizi kronis yang masih banyak dijumpai di Indonesia. Para informan melihat program ini sebagai kebijakan pemerintah yang bertujuan memenuhi kebutuhan gizi anak-anak sekolah. Informan IT menyampaikan bahwa:

“Program MBG adalah rencana pemerintah untuk memberi makanan gratis dan sehat kepada anak-anak sekolah. Tujuannya agar anak-anak tidak kelaparan, punya gizi cukup, dan bisa belajar lebih baik di sekolah” (Wawancara, 22 September 2025).

Pandangan yang sama diungkapkan oleh informan KB yang menegaskan :

“Program makan bergizi gratis ini adalah kebijakan pemerintah untuk memberikan makanan sehat dan bergizi kepada pelajar di sekolah. Program ini hadir supaya semua anak, tanpa melihat latar belakang ekonomi, bisa mendapatkan asupan gizi yang cukup untuk belajar dengan lebih baik dan tumbuh secara sehat” (Wawancara, 22 September 2025).

Informan MM menilai MBG merupakan upaya negara untuk memastikan siswa memperoleh makanan sehat setiap hari, sementara informan JP menyebut

program ini sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam mendukung pertumbuhan anak. Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya memahami MBG sebagai sekadar bantuan makanan gratis, tetapi juga sebagai strategi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan generasi muda. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa mahasiswa memahami MBG bukan hanya sebagai program bantuan makanan gratis, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan jangka panjang yang diorientasikan pada peningkatan kualitas kesehatan, daya pikir, dan pendidikan generasi muda Indonesia.

Persepsi Mahasiswa terhadap Manfaat dan Pelaksanaan MBG

Sebagian besar informan menilai bahwa program MBG memberikan manfaat besar, terutama dalam pemenuhan gizi, peningkatan konsentrasi belajar, dan penguatan daya tahan tubuh. Informan KB menyatakan bahwa:

"Tujuan utama program ini adalah meningkatkan kualitas kesehatan sekaligus kualitas pendidikan anak-anak Indonesia. Dengan gizi yang baik, anak-anak bisa lebih konsentrasi saat belajar, daya tahan tubuhnya kuat, dan pada akhirnya prestasi mereka juga meningkat" (Wawancara, 22 September 2025).

Hal yang sama disampaikan oleh informan BM yang melihat MBG sebagai cara untuk meningkatkan kualitas hidup anak-anak agar dapat tumbuh optimal. Namun, beberapa informan juga menyoroti persoalan pelaksanaan di lapangan. Informan HP mengungkapkan bahwa :

"Banyak yang masih terkena keracunan yang kita lihat di berita-berita, ada juga beberapa sekolah yang dipaksa untuk tidak bertanggung jawab apabila ada keracunan yang terjadi pada siswanya" (Wawancara, 22 September 2025).

Sejalan dengan itu, informan MH menambahkan bahwa :

"Banyak siswa yang justru lebih menunggu jam datangnya MBG ini dibanding jam pelajaran sekolah, ditambah dengan banyaknya kasus keracunan MBG menandakan bahwa Indonesia belum siap untuk melaksanakan program ini secara maksimal" (Wawancara, 22 September 2025).

Dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa meskipun manfaat MBG cukup signifikan, pelaksanaan teknis masih menghadapi hambatan, terutama terkait kualitas makanan, distribusi, serta pengawasan.

Penilaian MBG dalam Perspektif Asas Kemaslahatan Hukum Islam

Sebagian besar informan berpendapat bahwa MBG sesuai dengan asas kemaslahatan (maslahah) dalam hukum Islam. Informan IT menegaskan bahwa:

"Ya, program ini sangat sesuai dengan asas kemaslahatan, atau asas manfaat bagi banyak orang. Program ini membuat anak-anak lebih sehat dan lebih cerdas, serta mencegah hal-hal buruk seperti anak sakit karena kurang gizi atau tidak bisa belajar karena perutnya lapar" (Wawancara, 22 September 2025).

Hal serupa juga disampaikan oleh informan KB yang menyatakan bahwa:

“Kalau dilihat dari perspektif kemaslahatan, program ini sangat sesuai. Asas kemaslahatan kan menekankan manfaat bagi orang banyak, dan program makan bergizi gratis ini jelas membawa manfaat besar terutama bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu” (Wawancara, 22 September 2025).

Informan AA melihat MBG sejalan dengan prinsip jalbul mashalih wa dar’ul mafasid, sebab program ini memenuhi kebutuhan dasar, menjaga kesehatan jiwa (hifdz an-nafs), serta mendukung kecerdasan akal (hifdz al-‘aql). Meskipun demikian, beberapa informan memberikan catatan penting, antara lain makanan harus halal, dana yang digunakan bersumber dari anggaran sah, serta distribusi dilakukan secara adil agar benar-benar mencerminkan prinsip kemaslahatan Islam. Maka dapat disimpulkan bahwa MBG pada dasarnya sesuai dengan prinsip kemaslahatan Islam karena memberi manfaat luas, menjaga kesehatan jiwa, dan mendukung perkembangan akal. Namun, keselarasan tersebut hanya akan tercapai apabila program dijalankan dengan amanah, transparan, serta berpegang pada prinsip halal dan keadilan.

Kelebihan, Kekurangan, dan Saran Mahasiswa terhadap Program MBG

Para informan menyebutkan bahwa kelebihan program MBG antara lain menjamin pemenuhan gizi anak, mengurangi angka stunting, meringankan beban keluarga kurang mampu, serta mencetak generasi yang sehat dan produktif. Informan OP menekankan bahwa:

“Asas kemaslahatan kan intinya buat kebaikan banyak orang. Program ini jelas bermanfaat buat kesehatan, pendidikan, bahkan kualitas generasi muda” (Wawancara, 22 September 2025).

Di sisi lain, kekurangan yang sering muncul mencakup risiko penyalahgunaan anggaran, distribusi yang tidak merata, kualitas makanan yang belum konsisten, hingga kasus keracunan. Informan MH menilai bahwa:

“Program ini cocok dijalankan setelah pemenuhan hak pekerjaan bagi orang tua siswa dan peningkatan kualitas pendidikan tanah air, ditambah dengan pengawasan makanan yang ketat agar kasus keracunan dapat diminimalisir” (Wawancara, 22 September 2025).

Sebagai bentuk solusi, informan memberikan sejumlah saran, di antaranya perlunya pengawasan independen untuk menjamin transparansi program, pelibatan ahli gizi dalam penyusunan menu, pemberdayaan UMKM lokal dalam penyediaan bahan pangan, serta pemenuhan standar halal, sehat, dan bersih. Dengan demikian, program MBG diharapkan tidak hanya menjadi kebijakan teknis, tetapi juga kebijakan strategis yang mencerminkan asas kemaslahatan dalam hukum Islam dan dapat disimpulkan bahwa meskipun MBG memiliki banyak kelebihan yang mengarah pada kemaslahatan, program ini tetap memiliki kelemahan yang harus diantisipasi. Saran yang diberikan oleh informan menegaskan pentingnya transparansi, pengawasan independen, keterlibatan ahli

gizi, serta pemberdayaan UMKM lokal agar program benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Pembahasan

1. Pemenuhan Kebutuhan Gizi Anak Usia Sekolah.

Pemenuhan kebutuhan gizi anak usia sekolah merupakan faktor penting dalam mendukung tumbuh kembang fisik maupun perkembangan kecerdasan mereka. Masa sekolah merupakan periode emas di mana anak-anak membutuhkan asupan energi, protein, vitamin, dan mineral yang cukup untuk menunjang aktivitas belajar serta pertumbuhan tubuh. Kekurangan gizi dapat berdampak pada rendahnya konsentrasi, menurunnya daya tahan tubuh, serta menghambat prestasi belajar. Oleh karena itu, intervensi dalam bentuk penyediaan makanan bergizi menjadi salah satu strategi efektif untuk menciptakan generasi yang sehat dan cerdas. Dalam pemenuhan kebutuhan gizi anak usia sekolah, kini pemerintah telah mempersiapkan program makan bergizi gratis (MBG) yang telah dirasakan oleh para siswa di beberapa daerah. rogram ini tidak hanya sekadar memberikan makanan gratis, tetapi juga memastikan bahwa makanan yang disediakan memiliki kandungan gizi yang cukup sesuai kebutuhan anak sekolah. Dengan demikian, MBG berperan penting dalam menekan angka malnutrisi dan membantu terciptanya kondisi belajar yang lebih optimal.

Program makan bergizi gratis merupakan sebuah kebijakan dan inisiatif dari pemerintah yang bertujuan untuk menyediakan makanan sehat serta bergizi secara cuma-cuma kepada kelompok masyarakat tertentu, khususnya anak-anak usia sekolah dasar, sekolah menengah pertama hingga sekolah menengah atas. Program ini dirancang untuk membantu pemenuhan kebutuhan gizi harian anak-anak, mengurangi angka stunting, serta mendorong kehadiran dan konsentrasi siswa di sekolah. Survei yang dilakukan oleh GoodStats menunjukkan bahwa hanya 21% masyarakat yang menyatakan setuju dengan program ini, sementara 20% lainnya memilih untuk tidak memberikan pendapat atau tidak tahu terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) ini (Rahmah, Anggraini, Nilasari, & Salabilla, 2025), (Zaenudin, 2025) menunjukkan bahwa anak-anak yang mendapatkan makanan bergizi secara rutin memiliki tingkat konsentrasi yang lebih baik dan lebih jarang mengalami kelelahan saat belajardibandingkan anak-anak dengan status gizi buruk. Program makan bergizi di sekolah juga memiliki efek positif pada kesehatan jangka panjang anak, termasuk menurunkan risiko obesitas dan penyakit kronis yang dapat mengganggu aktivitas belajar. Peningkatan kondisi kesehatan dan konsentrasi siswa juga dapat dilihat melalui perspektif teori hierarki kebutuhan Maslow, yang menyatakan bahwa kebutuhan fisiologis seperti makan harus terpenuhi terlebih dahulu sebelum individu dapat berfokus pada pencapaian kebutuhan yang lebih tinggi, termasuk aktualisasi diri dalam bentuk prestasi akademik. Dalam konteks ini, MBG berperan sebagai pemenuhan kebutuhan dasar siswa, yang pada gilirannya memungkinkan mereka untuk lebih fokus dan produktif dalam kegiatan belajar (Zaenuddin, 2025).

Pemerintah telah menginisiasi berbagai program untuk mengatasi masalah gizi pada anak usia sekolah, salah satunya adalah *Program Makan Bergizi Gratis* (MBG). Narasumber 1 (IT) memberikan pendapatnya mengenai program makan bergizi gratis (MBG) yang kini telah dirasakan beberapa siswa di beberapa daerah:

"Program MBG adalah rencana pemerintah untuk memberi makanan gratis dan sehat kepada anak-anak sekolah. Tujuannya agar anak-anak tidak kelaparan, punya gizi cukup, dan bisa belajar lebih baik di sekolah."

Pendapat ini menegaskan bahwa pemenuhan gizi tidak hanya menyangkut kesehatan tubuh, tetapi juga sangat berkaitan dengan kemampuan anak dalam menyerap pelajaran. Dengan adanya program seperti MBG, diharapkan setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh sehat dan cerdas, tanpa terhambat oleh keterbatasan ekonomi keluarga. Lebih jauh lagi, pemenuhan gizi anak sekolah merupakan investasi jangka panjang bagi bangsa, karena anak-anak yang sehat, cerdas, dan produktif adalah modal utama dalam membangun Indonesia yang lebih maju di masa mendatang.

2. Efektivitas Program MBG

Efektivitas suatu program dapat diukur dari sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan mampu tercapai dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. **Program Makan Bergizi Gratis (MBG)**, efektivitasnya terlihat dari kemampuannya memenuhi kebutuhan gizi anak sekolah sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan. Program ini dirancang tidak hanya untuk mengurangi kelaparan di kalangan pelajar, tetapi juga mencegah masalah gizi buruk dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Dalam implementasinya, MBG memiliki banyak manfaat langsung. Anak-anak bisa belajar dengan konsentrasi lebih baik karena kebutuhan energi mereka terpenuhi. Selain itu, program ini berkontribusi dalam mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi karena semua pelajar, terutama dari keluarga kurang mampu, memperoleh hak yang sama untuk menikmati makanan sehat dan bergizi. Dengan begitu, MBG berpotensi memperbaiki kualitas sumber daya manusia Indonesia dalam jangka panjang.

Makan bergizi merupakan makanan yang memenuhi kebutuhan gizi yang diperlukan oleh tubuh. Makanan yang sehat dan bergizi mengandung berbagai zat yang bermanfaat bagi tubuh kita. Oleh karena itu, saat kita mengkonsumsi makanan sehari-hari mengandung makanan yang bergizi dan sehat yang nantinya dapat dicerna dan memberikan manfaat bagi tubuh. Makanan yang baik memiliki peran yang sangat mendukung dalam membantu meningkatkan konsentrasi belajar anak terutama anak berkesulitan belajar. Tetapi makanan yang baik belum tentu sehat, makanan sehat adalah makanan yang memenuhi kebutuhan makro dan mikro nutrisi. Implementasi program MBG (Makan Bergizi Gratis) memberikan dampak positif terhadap minat belajar siswa dalam jangka panjang. Hasil observasi partisipatif juga mengungkapkan bahwa siswa lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler

setelah mengikuti program MBG. Dengan anggaran yang besar, program MBG (Makan Bergizi Gratis) yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto bertujuan meningkatkan kualitas gizi sekaligus memotivasi belajar siswa di Indonesia. Dengan implementasi yang tepat, program MBG (Makan Bergizi Gratis) berpotensi meningkatkan kualitas pendidikan secara menyeluruh, mengurangi angka putus sekolah, serta mendorong keterlibatan komunitas dalam penyediaan makanan sehat bagi anak-anak disekolah (Herniati & Idawati, 2025)

Adanya program ini, membuat kebutuhan gizi anak terpenuhi karena program ini berkontribusi dalam mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi karena semua pelajar, terutama dari keluarga kurang mampu, memperoleh hak yang sama untuk menikmati makanan sehat dan bergizi. Narasumber 2 (KB) menyatakan bahwa:

"Menurut saya, efektivitas program ini lebih banyak membawa manfaat dibandingkan masalah. Memang ada potensi kendala, misalnya soal distribusi, kualitas makanan, atau anggaran yang rawan disalahgunakan. Tapi itu masalah teknis yang bisa diperbaiki. Substansi programnya sendiri jelas membawa lebih banyak kebaikan dan sejalan dengan kebutuhan masyarakat."

Meski terdapat tantangan dalam pelaksanaan, seperti distribusi yang tidak merata atau potensi penyalahgunaan anggaran, hal tersebut bukanlah alasan untuk menolak program ini. Kendala tersebut lebih bersifat teknis dan masih bisa diatasi dengan perencanaan serta pengawasan yang lebih baik. Inti dari program MBG tetap membawa kemaslahatan besar bagi generasi muda bangsa. Efektivitas MBG lebih condong pada manfaat yang dihasilkan dibandingkan masalah yang muncul. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada manajemen yang transparan, kualitas pengawasan, serta komitmen pemerintah untuk menjaga keberlanjutan program agar benar-benar menjadi solusi bagi pemenuhan gizi dan peningkatan mutu pendidikan di Indonesia.

3. Landasan Teoritis dan Konsep Kemaslahatan dalam hukum Islam

Kemaslahatan dalam hukum islam merupakan prinsip fundamental yang berarti segala sesuatu yang mendatangkan manfaat, kebaikan, dan mencegah kemudaratan atau kerusakan bagi manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Konsep ini bukan sekadar prinsip etis, melainkan landasan hukum yang digunakan oleh para ulama untuk menetapkan suatu hukum yang tidak secara eksplisit diatur dalam Al-Qur'an dan Sunnah, tetapi sejalan dengan tujuan utama syariat (maqasid syariah) yang mencakup lima pokok utama, yaitu menjaga agama (*hifz al-dīn*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-māl*). Teori ini menjadi dasar dalam memahami setiap kebijakan publik, termasuk program-program pemerintah, agar dapat dikaji apakah selaras dengan nilai maslahat yang diamanatkan syariat (Nabilah & Hayah, 2022).

Para ulama membagi kemaslahatan menjadi tiga tingkatan: *darūriyyāt* (primer), *ḥājjiyyāt* (sekunder), dan *taḥsīniyyāt* (tersier). Program yang memenuhi

kebutuhan pokok seperti pangan, kesehatan, dan pendidikan masuk dalam kategori *darūriyyāt* karena menyangkut kelangsungan hidup dan perkembangan akal manusia. Dalam konteks kebijakan negara, prinsip kemaslahatan menuntut agar keputusan yang diambil membawa manfaat nyata bagi masyarakat luas, adil dalam distribusi, serta tidak menimbulkan mudarat atau kerusakan terhadap yang menerima (Betawi, 2018).

Dalam kaidah fiqh disebutkan *tasharruf al-imām ‘ala al-ra’iyyah manūṭun bi al-maṣlahah* yang berarti kebijakan penguasa terhadap rakyat harus didasarkan pada kemaslahatan (Iqbal & dkk, 2025). Oleh karena itu, setiap program social yang dijalankan, seperti program Makan Bergizi Gratis yang digagas oleh pemerintah, didalamnya harus memiliki unsur maslahat yakni mampu menjamin kesejahteraan dan keadilan sosial. Dengan demikian, kemaslahatan bukan hanya konsep abstrak, melainkan asas yang harus menjadi pijakan praktis bagi pemerintah dan masyarakat dalam menyikapi setiap kebijakan.

4. Persepsi Mahasiswa PPKn UNIMED terhadap kemaslahatan Program MBG

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap mahasiswa PPKn FIS UNIMED, mereka memiliki pemahaman yang baik mengenai Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mereka menilai program ini sebagai salah satu kebijakan prioritas pemerintah untuk mengurangi angka stunting, memperbaiki status gizi anak, serta mendukung perkembangan fisik dan kecerdasan generasi muda. Pemahaman ini menunjukkan bahwa mahasiswa melihat MBG bukan semata-mata sebagai distribusi makanan gratis, melainkan sebagai strategi investasi jangka panjang bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pandangan tersebut selaras dengan penelitian terdahulu yang menekankan pentingnya intervensi gizi anak sekolah dalam mencegah masalah kesehatan dan meningkatkan prestasi belajar.

Terkait persepsi manfaat, mayoritas mahasiswa menilai MBG memberikan dampak positif, terutama dalam meringankan beban ekonomi keluarga, membantu pemenuhan kebutuhan gizi, dan meningkatkan konsentrasi belajar siswa. Dengan gizi yang tercukupi, anak-anak diharapkan mampu lebih fokus, produktif, dan berprestasi di sekolah. Persepsi ini juga menegaskan fungsi MBG sebagai program pemerataan sosial yang memungkinkan seluruh siswa, tanpa membedakan status ekonomi, memperoleh hak gizi yang sama. Namun demikian, mereka juga menyoroti permasalahan pelaksanaan, seperti adanya kasus keracunan, kualitas makanan yang kurang sesuai standar, serta distribusi yang tidak merata. Hal ini menunjukkan adanya gap antara tujuan kebijakan dan implementasi di lapangan.

Dari perspektif hukum Islam, mahasiswa menilai program MBG sesuai dengan asas kemaslahatan. Program ini sejalan dengan *maqashid al-shari’ah*, terutama dalam menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) dengan pemenuhan gizi, menjaga akal (*hifz al-‘aql*) melalui peningkatan konsentrasi dan kemampuan belajar, serta menjaga generasi (*hifz al-nasl*) dengan mencegah stunting dan kekurangan gizi. Dengan demikian, MBG tidak hanya bermanfaat secara medis, sosial, dan

ekonomi, tetapi juga memiliki legitimasi syariah. Prinsip jalbul mashalih wa dar'ul mafasid tampak jelas karena program ini berupaya mendatangkan kebaikan dan mencegah kerusakan di masyarakat.

Kelebihan program MBG terutama terletak pada cakupan manfaatnya yang luas, mulai dari peningkatan kesehatan anak, dukungan terhadap prestasi akademik, hingga pemerataan kesempatan bagi keluarga miskin. Meski demikian, mahasiswa juga mengidentifikasi sejumlah kelemahan, seperti potensi penyalahgunaan anggaran, lemahnya pengawasan distribusi, serta risiko makanan tidak higienis. Kritik ini penting sebagai masukan agar tujuan program tidak hanya ideal di atas kertas, tetapi juga nyata dirasakan di lapangan.

Oleh karena itu, mahasiswa menyarankan perlunya pengawasan ketat dalam setiap tahap pelaksanaan, mulai dari perencanaan, penyediaan bahan makanan, proses distribusi, hingga evaluasi hasil. Transparansi anggaran, keterlibatan ahli gizi, serta penyediaan makanan yang halal dan thayyib menjadi prasyarat penting agar MBG dapat mencapai tujuannya. Dengan penyempurnaan ini, program MBG berpotensi menjadi instrumen pembangunan manusia yang berkesinambungan dan sesuai dengan prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam.

5. Tantangan Implementasi MBG dalam Bingkai Hukum Islam

Dalam perspektif hukum Islam, penerapan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menghadapi sejumlah tantangan yang berpotensi mengurangi nilai kemaslahatan yang dituju yang dimana MBG dirancang untuk memenuhi kebutuhan gizi bagi anak-anak Indonesia yang diberikan untuk jenjang SD - SMA, serta mencegah stunting (Ar Rumi & Udzma, 2025). Tantangan pertama adalah pada aspek akuntabilitas dan transparansi, sebuah prinsip yang sangat ditekankan dalam pengelolaan harta publik (baitul mal). Potensi penyalahgunaan dana, seperti korupsi atau mark-up harga, merupakan mafsadah (kerusakan) yang dapat membatalkan tujuan mulia program MBG tersebut. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa anggaran yang digunakan untuk program makan bergizi gratis dilaksanakan dengan jujur dan efisien karena jika tidak, program ini hanya akan mendatangkan kerugian yang jauh lebih besar daripada manfaatnya (Nooraini & dkk, 2025).

Tantangan lainnya terdapat pada **kualitas dan standar gizi makanan** yang disediakan. Hukum Islam tidak hanya menekankan pada kuantitas, tetapi juga menuntut kualitas serta kehalalan makanan. Sesuai dengan prinsip *maslahah daruriyyat* (kebutuhan primer) untuk menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), makanan dalam program MBG harus benar-benar bergizi, aman, dan mampu menunjang kesehatan peserta didik. Jika makanan yang diberikan tidak layak, kurang bernutrisi, atau bahkan membahayakan kesehatan, maka program ini justru berpotensi menimbulkan *mudarat* (bahaya) dan bertentangan dengan tujuan kemaslahatan. Lebih jauh, Islam juga menekankan pentingnya standar *halal* dan *thayyib* (baik, sehat, dan bermanfaat), sehingga tantangan besar bagi penyelenggara adalah memastikan bahwa seluruh proses penyediaan, pengolahan, hingga distribusi makanan sesuai dengan syariat. Dengan demikian, keberhasilan

program MBG dalam perspektif hukum Islam sangat ditentukan oleh sejauh mana aspek halal, thayyib, dan gizi seimbang benar-benar dipenuhi secara konsisten. (Susanti & dkk, 2024).

Tantangan berikutnya terdapat dalam aspek keadilan penyaluran makan bergizi gratis, yang dimana merupakan prinsip fundamental dalam hukum Islam. Program MBG harus mampu menjangkau target penerima manfaat secara merata tanpa perilaku diskriminasi. Keadilan ini mencakup pemerataan pemberian MBG, tidak hanya anak-anak sekolah yang tinggal di perkotaan, pendistribusian MBG harus dapat dirasakan bagi anak-anak terutama yang berada di daerah pelosok yang paling membutuhkan. Jika distribusi tidak merata atau salah sasaran, maka akan terjadi ketidakadilan sosial (Palestina & dkk, 2025). Dalam hukum Islam, masalah tersebut dapat berpotensi menimbulkan *mafsadat* (kerugian) karena sebagian pihak yang berhak justru tidak mendapat manfaat. Ini bertentangan dengan prinsip *hifz al-nafs* (menjaga jiwa) dan *hifz al-'aql* (menjaga akal), karena tujuan utama MBG adalah menjaga kesehatan peserta didik agar mampu belajar dengan baik. Jika salah sasaran, maka manfaat tidak tercapai dan program kehilangan legitimasi maslahatnya. Dengan demikian, asas *maslahah* dalam hukum Islam menuntut agar MBG didistribusikan secara adil, tepat sasaran, dan transparan. Tanpa hal tersebut, kebijakan yang awalnya bernilai maslahat dapat berubah menjadi *mudarat* karena menimbulkan ketidakadilan sosial dan menyalahi amanah syariat.

Berdasarkan uraian pembahasan, program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara fundamental sejalan dengan asas kemaslahatan dalam hukum Islam. Persepsi mahasiswa PPKn UNIMED menguatkan pandangan ini, dapat disimpulkan bahwa program **Makan Bergizi Gratis (MBG)** pada dasarnya sejalan dengan asas kemaslahatan dalam hukum Islam, karena mengandung manfaat besar bagi pemenuhan kebutuhan gizi, peningkatan kualitas belajar, serta pencegahan stunting sebagai upaya menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-'aql*), dan menjaga generasi (*hifz al-nasl*). Namun, keberhasilan program MBG dalam mencapai kemaslahatan secara menyeluruh sangat bergantung pada implementasi di lapangan. Tantangan utama terletak pada akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran, kualitas makanan yang terjamin kehalalan dan gizinya, serta keadilan dalam distribusi. Jika tantangan-tantangan ini tidak diatasi, program yang awalnya bertujuan baik dapat berubah menjadi mafsadah (kerusakan) akibat penyalahgunaan dana, bahan makanan yang tidak higienis, serta belum ratanya penyaluran MBG terutama bagi anak-anak yang berada di daerah pelosok. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa setiap tahapan pelaksanaan program dijalankan dengan penuh amanah, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Jika permasalahan ini tidak diatasi, maka program yang semula dirancang untuk mendatangkan maslahat berpotensi berubah menjadi *mudarat* karena menimbulkan ketidakadilan, kerugian, bahkan kerusakan sosial. Oleh sebab itu, asas kemaslahatan tidak boleh hanya dijadikan justifikasi normatif, melainkan harus benar-benar diimplementasikan dalam setiap tahap pelaksanaan program MBG.

Agar program MBG benar-benar selaras dengan asas kemaslahatan dalam hukum Islam, terdapat beberapa solusi perlu diterapkan. Pertama, **peningkatan transparansi dan akuntabilitas anggaran** melalui mekanisme audit terbuka, pelibatan masyarakat, dan pengawasan lintas sektor sehingga potensi korupsi dapat dicegah. Kedua, **penjaminan kualitas gizi dan standar halal-thayyib** dengan melibatkan ahli gizi, lembaga sertifikasi halal, serta pengawasan ketat terhadap penyedia makanan agar makanan yang diberikan aman, bergizi, dan sesuai syariat. Ketiga, **pemerataan distribusi** yang memastikan siswa di daerah terpencil atau kelompok rentan juga mendapat akses yang sama, sehingga asas keadilan dalam Islam benar-benar terwujud. Dengan langkah-langkah tersebut, program MBG dapat menjadi instrumen nyata pembangunan manusia yang berkelanjutan, adil, dan sesuai dengan maqāṣid al-syarī'ah.

SIMPULAN

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada hakikatnya sejalan dengan asas kemaslahatan dalam hukum Islam. Kebijakan ini mendukung pemeliharaan jiwa (*ḥifẓ al-naḥs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), dan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) melalui pemenuhan gizi anak sekolah, pencegahan stunting, dan peningkatan konsentrasi belajar. Persepsi mahasiswa PPKn UNIMED memperkuat temuan ini: mereka melihat MBG sebagai investasi jangka panjang untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia sekaligus kebijakan yang memiliki legitimasi syariah. Temuan ini menunjukkan bahwa konsep maqāṣid al-syarī'ah dapat diaplikasikan secara nyata dalam kebijakan publik modern tanpa kehilangan relevansi dengan konteks sosial dan politik Indonesia. Selain memberikan manfaat kesehatan dan pendidikan, MBG juga berfungsi sebagai instrumen pemerataan sosial. Program ini menurunkan kesenjangan akses gizi antara keluarga mampu dan kurang mampu, sehingga mendukung cita-cita keadilan distributif dalam Islam. Dengan terpenuhinya kebutuhan dasar gizi, siswa dapat lebih fokus dan produktif dalam belajar, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas sumber daya manusia bangsa. Dari perspektif pembangunan, MBG tidak hanya program jangka pendek, tetapi juga investasi strategis bagi kemajuan generasi mendatang.

Meski demikian, keberhasilan program sangat ditentukan oleh implementasi di lapangan. Tantangan berupa transparansi dan akuntabilitas anggaran, jaminan kualitas dan kehalalan makanan, serta pemerataan distribusi dapat mengurangi nilai maslahat dan bahkan menimbulkan mafsadah jika diabaikan. Potensi penyalahgunaan anggaran atau ketidaksesuaian standar gizi dapat merusak tujuan mulia program. Karena itu, kemaslahatan tidak cukup dijadikan justifikasi normatif, melainkan harus diwujudkan dalam pengelolaan yang amanah, adil, dan berkelanjutan. Dengan manajemen yang baik, pengawasan ketat, dan keterlibatan aktif berbagai pemangku kepentingan, MBG berpeluang menjadi contoh kebijakan publik yang tidak hanya pro-rakyat, tetapi juga memiliki landasan teologis yang kuat. Keberhasilan MBG akan memperlihatkan bahwa kebijakan berbasis prinsip syariah mampu berkontribusi pada pembangunan nasional secara inklusif dan berkeadilan, sekaligus menegaskan peran hukum

Islam sebagai pedoman nyata dalam menghadirkan kemaslahatan umat di era modern.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada dosen pembimbing atas bimbingan dan arahan yang sangat berarti selama proses penelitian ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada para informan, khususnya mahasiswa PPKn UNIMED, yang telah bersedia memberikan waktu dan pandangan kritis terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Tak lupa, apresiasi diberikan kepada seluruh tim peneliti yang telah bekerja sama dengan penuh dedikasi dan semangat kolektif. Dukungan dari berbagai pihak telah menjadi bagian penting dalam penyelesaian penelitian ini. Semoga hasil kajian ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan kebijakan publik yang berlandaskan prinsip kemaslahatan dalam perspektif hukum Islam.

DAFTAR RUJUKAN

- Ar Rumi, A. J., & Udzma, H. (2025). Makan Bergizi Gratis Dalam Perspektif Hadis (Kajian Ma'anil Hadis). *Jurnal Ilmu Hadis*, 2(1).
<https://journal.nurulqadim.ac.id/index.php/jih/article/view/52>
- Aruni, F., Kurniawan, R., Angreni, D. K. D., & Zahara, A. (2023). *Politik Dan Kebijakan Publik*. Kalimantan Selatan: Ruang Karya.
- Betawi, U. (2018). Maqashid Al-Syariah Sebagai Dasar Hukum Islam Dalam Pandangan Al-Syatibi Dan Jasser Audha. *Jurnal Ilmiah Online*, 6(6).
<https://journal.pancabudi.ac.id/index.php/hukumresponsif/article/view/419>
- Hasibuan, A. R. G. H., & Resky, M. (2024). Nilai-Nilai Kemanusiaan Perspektif Wahbah Zuhaili Dalam Tafsir Al-Munir Terhadap Pengembangan Pendidikan Indonesia. *Muslim Heritage*, 9(2), 23-35.
- Herawan, R., & Lambelanova, R. (2025). *Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Dan Perbaikan Infrastruktur Jalan Di Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat* (Doctoral dissertation, Institut Pemerintahan dalam Negeri).
- Herniati, N., & Idawati. (2025). Efektivitas Program Pemerintah MBG (Makan Bergizi Gratis) Terhadap Minat Belajar Anak Usia Dini. *Aura: Jurnal Pendidikan Aura*, 88-98.
<https://jurnal.iainhancor.ac.id/index.php/aura/article/view/2484/1463>
- Iqbal, M., & dkk. (2025). *Hukum Islam Dalam Bingkai Pancasila Dan Kewarganegaraan*. Jakarta: KENCANA.
- Nabilah, W., & Hayah, Z. (2022). Filosofi Kemaslahatan Dalam Aksiologi Hukum Islam (Telaah Kitab Maqashid Syariah). *Jurnal Studi Keislaman*, 7(1).
<https://ejournal.uinmybatusangkar.ac.id/ojs/index.php/elhekam/article/view/5810/0>
- Nooraini, F. F., & dkk. (2025). *Peran Policy Entrepreneur Dalam Program Makan Bergizi Gratis*. Surabaya: PT. Pustaka Saga Jawadwipa.

https://www.researchgate.net/profile/M-Roehman-Zainur-Riedho2/publication/391395302_Peran_Policy_Entrepreneur_Perempuan_dalam_Pemberdayaan_Penyandang_Disabilitas/links/6814de7dded433155741335a/Peran-Policy-Entrepreneur-Perempuan-dalam-Pemberdayaan-Penyan

- Palestina, F. A., & dkk. (2025). Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam Perspektif Keadilan Sosial dan Dinamika Sosial – Politik. *Pancasila: Jurnal KelIndonesiaan*, 5(1).
<https://ejournalpancasila.bpip.go.id/index.php/PJK/article/view/726>
- Rahmah, H. A., Anggraini, A., Nilasari, Y. P., & Salabilla, E. P. (2025). Analisis Efektivitas Program Makan Bergizi Gratis di Sekolah Dasar Indonesia Tahun 2025. *Integrative Perspectives of Social and Science Journal (IPSSJ)*, 2855-2866. <https://ipssj.com/index.php/ojs/article/view/380/349>
- Suryani, A. (2020). Pengaruh Sarapan Sehat terhadap Kognisi Anak. *Jurnal Gizi dan Pendidikan*, 5(2), 134-140.
- Susanti, S. S., & dkk. (2024). Konsep dan Tantangan Zona Kuliner Halal Aman dan Sehat Perspektif Maqasid Al-Syariah. *Jurnal Bimbingan dan Konseling Keluarga*, 6(3).
<https://journal.laaroiba.com/index.php/as/article/view/7167>
- Sutikno, S., Kurniati, K., & Sultan, L. (2023). Konsep Maslahat dalam Pandangan Imam Malik, Al Ghazali, dan Al Tufiy. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 11(01), 43-60.
- Toriquddin, M. (2014). Teori Maqâshid Syari'ah Perspektif Al-Syatibi. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, 6(1).
- Sutmasa, Y. G. (2021). Memastikan Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, 4(1), 25-36.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Bandung: CV Alfabeta. Retrieved September 21, 2025.
- Zaenuddin, D. (2025). Manfaat Program Pemberian Makan Bergizi Gratis (MBG) terhadap Kesehatan dan Konsentrasi Belajar Siswa di SMAN1 Pebayuran. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 17297-17301.
<https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/28617/19163>.